

STRATEGI KOMUNIKASI DINAS PPKB DAN PPPA DALAM MENDORONG KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK

Aisyah Auliya Sudrajat, Sunarto
auliaaisya272@gmail.com

Program Studi S1 Ilmu Komunikasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang Kode Pos 1269 Telepon (024) 746407
Faksimile (024) 746504 Laman: <https://fisip.undip.ac.id> / Email: fisip@undip.ac.id.

ABSTRACT

Pacitan District has only drafted a CFC local regulation in 2023, despite having declared itself a Child-Friendly City (CFC) since 2013. As the leading sector, the Department of Population Control, Family Planning, Women's Empowerment, and Child Protection Pacitan is tasked with encouraging the policy. Therefore, this research aims to analyze how the communication strategies of the Department of Population Control, Family Planning, Women's Empowerment, and Child Protection Pacitan encourage the Child-Friendly City policy. This research uses a qualitative method with a case study approach and in-depth interview data collection techniques. The theory used is actor-network theory. As a result, the Department of Population Control, Family Planning, Women's Empowerment, and Child Protection Pacitan uses a persuasive communication strategy. It builds a network through four translation processes, problematization, interestment, enrollment, and mobilization. The communication strategy has optimized human and non-human actors (policies and evaluation results) and generated commitment and innovation to support CFC.

Keywords: Communication strategy, Child-Friendly City, actors, actor-network

ABSTRAK

Kabupaten Pacitan baru menyusun Perda Kota Layak Anak (KLA) di tahun 2023, meski telah mendeklarasikan diri sebagai sebagai Kota Layak Anak di tahun 2013. Dinas PPKB dan PPPA sebagai *leading sector*, bertugas untuk mendorong kebijakan tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana strategi komunikasi Dinas PPKB dan PPPA dalam mendorong kebijakan Kota Layak Anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam. Adapun teori yang digunakan adalah *actor network theory*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, Dinas PPKB dan PPPA menggunakan strategi komunikasi persuasif melalui empat bagian dalam proses *translation*, yakni *problematization*, *interestment*, *enrollment*, dan *mobilization*. Strategi komunikasi yang dilakukan telah mampu mengoptimalkan *human actor* dan *non-human actor* (Kebijakan dan hasil evaluasi). Strategi komunikasi ini juga memunculkan komitmen dan inovasi untuk mendukung Pacitan sebagai Kota Layak Anak.

Kata kunci: Strategi komunikasi, Kota Layak Anak, aktor, jaringan aktor.

PENDAHULUAN

Sejak tahun 2006 Indonesia telah menginisiasi Kota Layak Anak (KLA) dan telah melakukan Evaluasi Kota Layak Anak (KLA) di tahun 2011. Kabupaten Pacitan sebagai salah satu Kabupaten yang aktif mengikuti evaluasi tersebut memiliki kondisi yang cukup menarik. Sejak tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Pacitan telah mendeklarasikan diri sebagai Kota Layak Anak. Namun, Peraturan Daerah (Perda) terkait Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pacitan baru dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2023. Perda tersebut tercatat sebagai Perda inisiatif yang diprakarsai oleh Komisi II DPRD Kabupaten Pacitan. Perjalanan 10 tahun Kabupaten Pacitan untuk mengajukan Raperda Kota Layak Anak menarik untuk dicermati karena membutuhkan proses yang cukup panjang.

Dalam penelitian yang berjudul *Making Child-Friendly Cities: A Socio-spatial Literature Review* yang ditulis oleh Cordero-Vinueza, et al. (2023), konsep *Child-Friendly Cities* atau Kota Layak Anak dibagi menjadi tiga dimensi, yakni hak, tata kelola, dan lingkungan fisik. Artinya, pemenuhan hak anak dan tata kelola yang baik merupakan syarat untuk menerjemahkan hak anak ke dalam

lingkungan fisik (Cordero-Vinueza et al., 2023).

Pengakuan hak dan tata kelola menjadi faktor penting bagi implementasi Kota Layak Anak. Dimana hal tersebut dapat ditunjukkan dalam bentuk kebijakan, undang-undang, anggaran, dan ruang partisipasi (Freeman, 2006). Oleh sebab itu, keberadaan Perda KLA merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan Kota Layak Anak.

Belum adanya Perda KLA dapat terjadi karena beberapa faktor, mulai dari mahalannya biaya penyusunan perda, proses penerbitan perda yang cukup lama, belum adanya kesadaran dari beberapa perangkat daerah bahwa pemenuhan dan perlindungan anak merupakan sebuah isu strategis, hingga partisipasi anak dalam penyusunan perda yang masih terkesan simbolik dekoratif menjadi permasalahan nyata yang patut untuk dicermati.

Dinas PPKB dan PPPA sebagai lembaga yang membidangi perlindungan anak memegang peranan yang signifikan dalam membangun komunikasi dengan sejumlah pihak yang terlibat. Mulai dari membangun urgensi mengenai Kota Layak Anak, memberikan pemahaman mengenai tugas dan fungsi dari masing-masing pihak, hingga membangun interaksi yang berkelanjutan. Itulah sebabnya, penelitian

ini tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang, “Bagaimana strategi komunikasi Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan dalam mendorong kebijakan Kota Layak Anak?”

TUJUAN PENELITIAN

Studi kasus memungkinkan peneliti untuk melihat masalah secara mendalam. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana strategi komunikasi Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan dalam mendorong kebijakan Kota Layak Anak (KLA). Penelitian ini fokus untuk melihat bagaimana jaringan aktor yang terbentuk dalam mendorong kebijakan KLA. Oleh sebab itu, proses analisis dilakukan berdasarkan hasil wawancara aktor-aktor yang terlibat, sehingga nantinya dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan.

KERANGKA TEORETIS

Paradigma Post-positivisme

Paradigma penelitian merupakan suatu sistem kepercayaan atau cara pandang yang digunakan untuk membimbing sebuah penelitian. Paradigma dapat dipahami pula sebagai serangkaian kepercayaan dan keyakinan yang berhubungan dengan prinsip utama atau prinsip pokok (Sunarto, 2024). Penelitian ini menggunakan

paradigma post-positivisme sebagai kerangka acuan. Paradigma post-positivisme memandang realitas secara kritis, dimana realitas itu tidak sepenuhnya “nyata” karena adanya ketidaksempurnaan pemahaman dari masing-masing individu (Sunarto, 2024). Ketidaksempurnaan pemahaman ini berasal dari beragamnya persepsi individu dalam memahami sesuatu karena dipengaruhi oleh latar belakang sosial, ekonomi, politik, dan kultur (Sunarto, 2024). Paradigma post-positivisme memungkinkan peneliti untuk berinteraksi dengan objek penelitian. Dimana nantinya, objektivitas dalam penelitian dapat diperoleh dari konfirmasi penelitian terdahulu maupun memanfaatkan komunitas kritis (Sunarto, 2024).

Komunikasi Organisasi: Actor-Network Theory

Organisasi pada dasarnya selalu berkaitan dengan proses mencapai tujuan melalui kerjasama. Sehingga komunikasi organisasi merupakan bidang yang mempelajari mengenai bagaimana kerja sama dapat tercapai dan organisasi dapat diciptakan (Littlejohn & Foss, 2011). Terdapat tiga aspek umum dalam organisasi, yakni (1) Struktur, bentuk, dan fungsi organisasi, (2) Manajemen, kontrol, dan kekuasaan, serta (3) Budaya organisasi (Littlejohn & Foss, 2011).

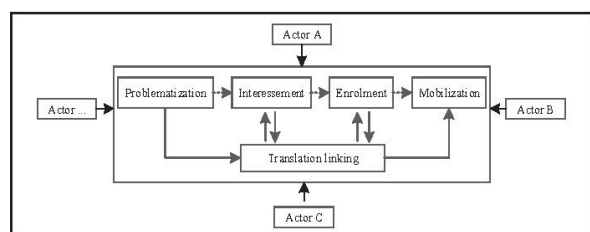
Komunikasi dalam organisasi bukan hanya terjadi melalui penyampaian pesan secara verbal karena pada dasarnya komunikasi merupakan sebuah proses yang kompleks. Dalam komunikasi organisasi, tradisi sibernatika berusaha untuk menguraikan kompleksitas makna pesan dengan melihat struktur yang muncul dari pola interaksi (Littlejohn & Foss, 2011).

Salah satu teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan struktur dan pola interaksi dalam organisasi adalah *actor network theory*. *Actor network theory* telah diadopsi oleh beberapa bidang untuk menjelaskan bagaimana interaksi dapat menjadi proses dari terciptanya struktur dalam skala besar (Littlejohn & Foss, 2011). *Actor Network Theory* berusaha menjelaskan bagaimana langkah koletif dibangun dari aktivitas manusia dan agen non manusia seperti mesin dan kebijakan. Sehingga dalam teori ini, terdapat dua karakteristik aktor, yakni *human* dan *non-human* (Littlejohn & Foss, 2011). Dalam teori ini, ketika melakukan interaksi dengan pihak lain, aktor bukan hanya mewakili diri mereka sendiri, tetapi juga berbicara atas nama jaringan kelompok yang lebih besar (Littlejohn & Foss, 2011). Sehingga mereka harus mampu menerjemahkan makna supaya dapat dipahami oleh aktor di luar jaringan atau dengan kata lain, pada proses

pengorganisasian penerjemahan menjadi proses utama (Littlejohn & Foss, 2011).

Dalam *actor network theory* penting untuk memahami adanya konsep percakapan dan teks. Percakapan merujuk pada interaksi (Proses pertukaran informasi, ide, dan makna) antar aktor, baik individu maupun kelompok. Sedangkan teks merujuk pada simbol tertulis yang menggambarkan struktur serta fungsi organisasi. Teks dalam hal ini bisa berupa dokumen seperti kebijakan (Littlejohn & Foss, 2011). Artinya, dalam *actor network theory* pengorganisasian bukan hanya dibentuk dari faktor manusia tetapi juga non-manusia, seperti keberadaan norma, prosedur, maupun dokumen yang harus diikuti.

Salah satu konsep penting dalam *actor network theory* adalah *translation*. Proses ini terjadi ketika para aktor menyelaraskan kepentingan orang lain dengan kepentingan diri mereka sendiri (Callon, 1986). Callon (1986) kemudian membaginya menjadi empat fase *translation* sebagai berikut.



Gambar 1 Proses *Translation*

- a. **Problematization**, bagian ini digunakan untuk melakukan pembedaan masalah dan mendefinisikan bagaimana kepentingan aktor lain konsisten dengan kepentingan sendiri. Pada bagian ini penting untuk diketahui bagaimana proses dapat dikendalikan untuk mencapai kepentingan dari semua aktor. Pada tahapan ini terjadi proses *co-orientation*.
- b. **Interestment**, pada bagian kedua, *focal actor* mulai fokus untuk bisa meyakinkan aktor lain menerima masalah berdasarkan kepentingan mereka. Dalam bagian ini, aktor diharapkan mampu memahami apa yang menjadi minat atau kepentingan lain.
- c. **Enrollment**, bagian ketiga mendeskripsikan bagaimana aktor yang terlibat melakukan negosiasi, menerapkan strategi dan *power* mereka supaya sejalan dengan kepentingan yang ingin dicapai. Termasuk tentang bagaimana masing-masing aktor melakukan penyesuaian diri dan mendefinisikan peran dalam jaringan aktor yang telah dibuat.
- d. **Mobilization**, pada bagian keempat yang menjadi fokusnya adalah bagaimana aktor kunci memastikan bahwa perwakilan dari kelompok bisa mewujudkan kepentingan mereka. Sehingga dalam fase ini akan melibatkan upaya membangun dukungan dan

memastikan bahwa pihak yang terlibat benar-benar menjalankan program yang telah disepakati.

Sejalan dengan proses *translation*, sebagai salah satu ilmuwan yang berkontribusi dalam mengembangkan *actor network theory*, James R. Taylor memulai pemikirannya dengan gagasan bahwa pengorganisasian mulai terjadi ketika dua orang berinteraksi dalam fokus tertentu (Topik, isu, perhatian, situasi, ide, tujuan, kelompok, dsb) atau ia menyebutnya sebagai *co-orientation* (Littlejohn & Foss, 2011). Dalam proses *translation*, *co-orientation* merupakan bagian dari *problematization*. Lebih lanjut, Taylor menjelaskan adanya A-B-X *triad*, yakni A merujuk pada orang pertama, B merujuk pada orang kedua, dan X pada perhatian bersama atau objek yang menjadi fokus dalam interaksi (Littlejohn & Foss, 2011).

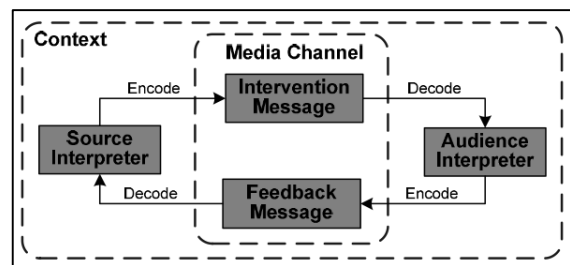
Strategi Komunikasi Persuasif dalam Komunikasi Politik

Tujuan dilakukannya komunikasi adalah mencapai kesepakatan yang sama (*mutual understanding*), itulah sebabnya komunikasi dan politik tidak bisa dipisahkan. Terdapat istilah “Politik meliputi komunikasi” dan “Komunikasi mencakupi politik” (Arifin, 2011). Istilah “Politik meliputi komunikasi” muncul karena dalam definisi komunikasi juga

memiliki makna politik, yakni dilakukan untuk memberikan pengaruh (*Influenze*) dan pengaruh merupakan salah satu unsur utama dari politik (Arifin, 2011). Sedangkan “Komunikasi mencakupi politik” berdasar pada sifat politik yang serba hadir (*ubiquitous*), multi makna, dan multi definisi (Arifin, 2011). Sebagaimana yang telah ditulis oleh Aristoteles dalam karyanya *Politics* tahun 335SM, *man is by nature a political animal*, yakni manusia secara alami adalah makhluk yang berpolitik (Arifin, 2011). Berdasarkan hal tersebut, Arifin (2011) kemudian menyimpulkan bahwa, (1) “Politik adalah komunikasi” berarti politik dilakukan dengan komunikasi, salah satunya melalui “percakapan”, serta (2) “Komunikasi adalah politik” karena komunikasi bertujuan untuk mempengaruhi dimensi politik. Sehingga komunikasi politik dapat dipahami sebagai proses penyampaian pesan untuk memberikan pengaruh dalam kehidupan bernegara (Arifin, 2011).

Salah satu strategi komunikasi yang dilakukan dalam konteks komunikasi politik adalah strategi komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif pada dasarnya merupakan proses yang melibatkan banyak kontak. Dimana Mc Croskey & Teven (1999) dalam Warren et al., (2016) menjelaskan bahwa dalam melakukan komunikasi persuasif,

kepercayaan dan kredibilitas komunikator dianggap mempengaruhi keberhasilan dalam memberikan pengaruh dan kepatuhan kepada komunikan. Dalam melakukan komunikasi persuasif terdapat beberapa elemen yang digunakan sebagai acuan untuk memberikan pengaruh persuasif dalam komunikasi (Cugelman et al., 2009).



Gambar 2 Communication-Based Influence Components Model

- a. **Source Interpreter** merupakan aktor atau sistem baik yang mengirimkan kode maupun menginterpretasikan kembali umpan balik dari audiens sebelumnya. *Source interpreter* biasanya akan memberikan pengaruh utama dari kredibilitas, daya tarik, kesukaan, kesamaan, dan biasanya memberikan pengaruh tambahan berupa timbal balik, komitmen dan otoritas. Adapun bentuk komunikasi persuasifnya dapat berupa isyarat, bahasa, dinamika sosial, dan peran sosial.
- b. **Intervention Message** yaitu pesan yang dirancang untuk mempengaruhi perilaku. Faktor-faktor yang ada di dalamnya seperti kekuatan argumen

yang diusulkan, adanya kebaruaran, kekuatan, serta relevansi argumen.

- c. ***Audience Interpreter*** menggambarkan proses dimana audiens memberikan umpan balik. Umpan balik ini bisa ditunjukkan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam proses komunikasi persuasif, penting untuk mencegah faktor-faktor yang bisa menghambat aktor untuk mengirimkan umpan balik.
- d. ***Feedback Message*** artinya pesan atau informasi yang dikirim audiens ke sumber. *Feedback* ini digunakan sebagai sumber untuk merencanakan intervensi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan dari audiens.

Perumusan Kebijakan dalam Sistem Politik

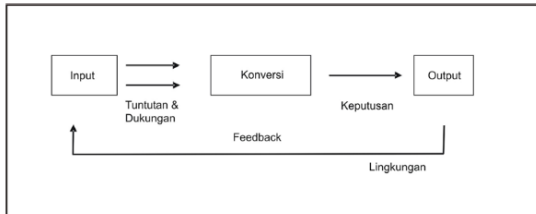
Kebijakan di Indonesia sendiri memiliki hirarki yang mana kebijakan di bawah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan di atasnya. Kedudukan paling atas dipegang oleh Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian di bawahnya terdapat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan yang terakhir Peraturan

Daerah Kabupaten/Kota (Pemerintah Indonesia, 2011). Dimana Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota yang menempati hirarki paling bawah memiliki peran yang cukup signifikan dalam menyelenggarakan otonomi daerah karena memungkinkan untuk menampung adanya kondisi khusus dan menjabarkan lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, proses penyusunan Perda dimulai dengan perumusan Prolegda oleh DPRD Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dimana terdapat lima tahapan yang setidaknya harus dilalui, yakni tahap inventarisasi, tahap seleksi, tahap koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD, tahap penetapan, dan tahap penyebaran.

Alur pembentukan Perda tersebut sejalan dengan alur kerja sistem politik yang meliputi unsur *input*, *konversi* (proses), *output*, *feedback*, serta lingkungan. Dalam buku Sistem Politik yang ditulis oleh (Pribadi & Muhyidin, 2014) dijelaskan alur kerja sistem politik yang menjelaskan bagaimana sistem politik dapat bekerja. Yakni, dengan adanya *input* yang meliputi tuntutan serta dukungan, konversi atau proses perubahan, serta *output* yang berupa keputusan atau

kebijakan. Selain itu, *output* biasanya juga menghasilkan *feedback* yang kemudian ikut mempengaruhi *input*. Lebih lanjut berikut merupakan alur kerja dari sistem politik.



Gambar 3 Alur Kerja Sistem Politik

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan post-positivisme dan metode studi kasus. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan melakukan *in-depth interview* dengan 11 informan yang terlibat.

Pada tahapan analisis dan interpretasi data, terdapat tiga teknik analisis studi kasus yang digunakan, yakni *pattern matching*, *explanation building*, dan *time-series analysis*. Hasil penelitian nantinya akan memberikan gambaran mengenai bagaimana jaringan aktor yang terbentuk dalam melakukan strategi komunikasi untuk mendorong kebijakan Kota Layak Anak di Kabupaten Pacitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Komunikasi Dinas PPKB dan PPPA dalam Mendorong Kebijakan Kota Layak Anak

Dalam organisasi, komunikasi merupakan salah satu cara membangun kerjasama dalam rangka mencapai tujuan. Oleh sebab itu, komunikasi bukan hanya berkaitan dengan hal-hal yang dilakukan secara verbal, melainkan juga melibatkan aspek non-verbal seperti interaksi. Menurut *Actor Network Theory* interaksi yang dilakukan oleh aktor baik *human* maupun *non-human* akan membentuk struktur dalam skala besar (Littlejohn & Foss, 2011). Oleh sebab itu, penelitian ini menganalisis bagaimana struktur atau jaringan aktor yang terbentuk dari strategi komunikasi yang diterapkan oleh Dinas PPKB dan PPPA, serta bagaimana masing-masing aktor berperan di dalamnya.

a. Pembentukan Jaringan Aktor Melalui Proses *Translation*

Berdasarkan analisis strategi komunikasi Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan dalam Mendorong Kebijakan Kota Layak Anak dapat disimpulkan bahwa Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan menggunakan strategi komunikasi persuasif untuk mempengaruhi jaringan aktor. Dalam prosesnya *translation* bagian pertama, yakni *problematization* dimana para aktor telah memahami bagaimana urgensi dari

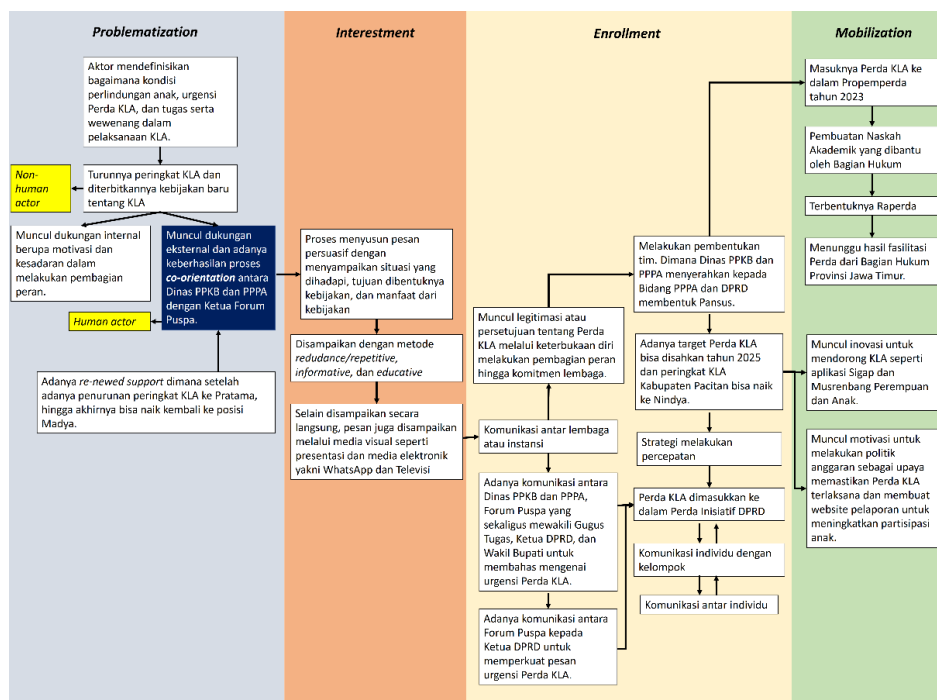
perlindungan anak hingga Perda KLA. Adanya tuntutan, dukungan, dan *re-newed support* juga menunjukkan para aktor mulai menyadari permasalahan. Pada bagian ini juga, Dinas PPKB dan PPPA berhasil melakukan *co-orientation* dengan Ketua Forum Puspa yang kemudian keduanya menjadi *focal actor*.

Pada bagian yang kedua yakni *interestment*, *focal actor* mulai meyakinkan aktor lain untuk bisa menerima masalah berdasarkan dengan kepentingan mereka. Hal ini dilakukan dengan menjelaskan bagaimana situasi yang terjadi, tujuan dibentuknya Perda KLA, dan manfaat Perda KLA. Proses ini dilakukan dengan tiga metode yakni *repetitive/redundance*, *informative*, dan *educative*. Adapun media yang digunakan selain menyampaikan secara langsung adalah media visual seperti

presentasi dan media elektronik yakni televisi dan WhatsApp.

Pada bagian ketiga yakni *enrollment* para aktor berhasil mendeskripsikan peran mereka, melakukan negosiasi, menerapkan strategi, dan menggunakan *power* untuk mencapai tujuan. Hal ini dapat dilihat melalui adanya penetapan target, proses lobi kepada pemangku kebijakan, strategi melakukan percepatan dengan memasukan Perda KLA ke dalam Perda inisiatif DPRD, pembentukan tim, dan adanya interaksi dalam berbagai level.

Bagian yang keempat adalah *mobilization*, dimana pada bagian ini aktor telah memastikan bahwa setiap bagian menjalankan tugasnya dengan baik. Mulai dari penyusunan dokumen Propemperda, Naskah Akademik, pembahasan Perda KLA, hingga proses fasilitas Perda KLA.



Gambar 4 Bagan Alir Dinas PPKB dan PPPA dalam mendorong Kebijakan Kota Layak Anak

b. Peran Aktor

Dalam *actor network theory* keberadaan aktor baik *human* dan *non-human* merupakan sebuah kunci dari terbangunnya interaksi yang ada di dalam jaringan. Pada karakteristik *human*, berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa *focal actor* yang mengalami proses *co-orientation* yakni Kepala Dinas PPKB dan PPPA, Sekretaris Dinas PPKB dan PPPA yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Bidang PPPA, dan Ketua Forum Puspa memiliki kredibilitas sebagai tokoh yang dekat dengan dunia anak. Selain itu, jabatan sebagai Ketua Forum Puspa juga membantu tokoh dalam mengkomunikasikan kebutuhan Perda Layak Anak kepada pihak DPRD. Adapun dari pihak Ketua DPRD sendiri dari sisi kekuasaan menunjukkan komitmennya untuk mengambil sikap memprioritaskan Kota Layak Anak.

Sementara itu, dari sisi *non human*, kebijakan Kota Layak Anak berupa Petunjuk Teknis Penilaian KLA dari Kementerian PPPA mengalami perubahan dengan indikator yang lebih spesifik. Hal ini menyebabkan hasil evaluasi yang diperoleh Kabupaten Pacitan menjadi kurang optimal. Oleh sebab itu, aktor *non-human* inilah yang juga mendorong aktor *human* segera membuat dan mengesahkan Perda KLA.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi yang digunakan oleh Dinas PPKB dan PPPA dalam mendorong kebijakan Kota Layak Anak adalah menggunakan strategi komunikasi persuasif. Strategi komunikasi persuasif dalam komunikasi politik digunakan untuk mempengaruhi khalayak dengan cara membujuk (Arifin, 2011). Dimana aktor melakukan interaksi melalui bahasa dan peran sosial untuk mempengaruhi perilaku aktor lain. Komunikasi yang dilakukan juga memungkinkan adanya umpan balik. Bahkan memunculkan *re-newed support* untuk melakukan komunikasi secara berkelanjutan dalam konteks mendorong kebijakan Kota Layak Anak. Hal ini dapat dilihat dari proses lobi yang dilakukan dengan memanfaatkan momentum kembalinya peringkat Kabupaten Pacitan kembali ke Madya, Ketua Forum Puspa yang juga mewakili Gugus Tugas dan Dinas PPKB dan PPPA berusaha membujuk Wakil Bupati dan Ketua DPRD untuk bisa segera mendorong terbentuknya Perda KLA.

2. Kelebihan dan Kekurangan dari Strategi Komunikasi yang Dilakukan

Kelebihan dari strategi ini salah satunya berkaitan dengan keberhasilan Dinas PPKB dan PPPA dalam proses *co-orientation* dengan Ketua Forum Puspa.

Dimana keduanya kemudian menjadi *focal actor* untuk membangun jaringan dengan pihak-pihak yang akhirnya mendorong segera dibentuk dan disahkannya Perda Kota Layak Anak (KLA). Dalam hal ini, *focal actor* tersebut memiliki kredibilitas dekat dengan dunia anak. Selain itu, jabatan sebagai Ketua Forum Puspa juga memberikan dampak dimana aspirasi yang disampaikan lebih dipertimbangkan oleh pihak DPRD. Melalui strategi ini, Perda KLA kemudian dapat dimasukkan dalam Propemperda melalui Inisiatif Dewan khusus dari Komisi II DPRD Kabupaten Pacitan supaya prosesnya lebih cepat. Hal ini juga didukung dengan adanya studi banding, menjadikannya Perda KLA sebagai prioritas untuk bisa disahkan di tahun 2025, serta menugaskan beberapa pihak untuk mengawal Perda KLA. Selain itu, hasil evaluasi Perda KLA yang sempat turun dan adanya indikator penilaian evaluasi Kota Layak Anak yang semakin spesifik, juga dimanfaatkan dengan baik sebagai momentum untuk membangun kesadaran dari aktor-aktor yang terlibat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kelebihan strategi ini adalah mampu mengoptimalkan aktor yang dimiliki baik aktor dengan karakteristik *human* maupun *non-human*.

Strategi komunikasi yang dibangun menciptakan sebuah langkah kolektif dimana pada akhirnya para aktor bukan

hanya mewakili dirinya sendiri tetapi juga berbicara atas nama jaringan kelompok yang lebih besar (Littlejohn & Foss, 2011). Berdasarkan hal tersebut, Dinas PPKB dan PPPA bukan hanya mampu mendorong Perda KLA segera dibentuk dan disahkan, melainkan juga menciptakan jaringan untuk bisa mendukung pelaksanaan Kota Layak Anak. Beberapa aktor yang terlibat menyatakan komitmen, ide, inovasi, hingga kesadaran bahwa urusan Kota Layak Anak bukan hanya menjadi tanggung jawab dari salah satu instansi, tetapi juga membutuhkan kolaborasi.

Pelaksanaan strategi komunikasi Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan dalam mendorong kebijakan Kota Layak Anak masih memiliki sejumlah kekurangan. Kekurangan tersebut berkaitan dengan rendahnya pemahaman dari beberapa aktor mengenai konsep Kota Layak Anak. Hal ini salah satunya disebabkan karena adanya mutasi atau pergeseran pegawai yang menyebabkan beberapa diantara mereka belum memahami secara utuh konsep Kota Layak Anak. Akibatnya, strategi komunikasi yang dilakukan menjadi kurang optimal dan memiliki tantangan tersendiri karena isu perlindungan anak sempat dianggap kurang penting untuk diperhatikan serta masih adanya budaya patronase yang berkembang. Hal ini juga berdampak pada partisipasi anak, dimana Forum Anak

merasa bahwa mereka hanya dilibatkan di awal dan tidak diberikan informasi lanjutan mengenai Perda KLA.

Aspek regulasi tahapan dan waktu tunggu yang lama juga menjadi kekurangan dari strategi komunikasi ini. Perda KLA sebenarnya sudah difasilitasi ke Bagian Hukum Provinsi Jawa Timur sejak Bulan Desember 2023 dan baru bisa disahkan di Maret 2025. Selain karena tidak ada SOP yang menjelaskan estimasi waktu pelaksanaan fasilitasi, rentang waktu yang cukup lama ini salah satunya disebabkan karena adanya Pemilu dan Pilkada di tahun 2024 yang menyebabkan beberapa anggota dewan menjadi kurang fokus dalam mengawal Perda KLA. Artinya, strategi komunikasi yang dibangun juga harus memperhatikan bagaimana situasi yang terjadi.

3. Dampak Strategi Komunikasi

Lingkungan fisik merupakan penerjemahan dari tata kelola dan pemenuhan hak anak yang ada di sebuah wilayah (Cordero-Vinueza et al., 2023). Dalam penelitian ini, dapat kita lihat bagaimana komitmen berbagai pihak untuk mewujudkan Pacitan sebagai Kota Layak Anak. Mulai dari dibentuknya sistem Sigap untuk melakukan pendokumentasian dan pengadministrasian yang nantinya akan mendukung proses evaluasi KLA, munculnya Musrenbang Perempuan dan

Anak sebagai salah satu sarana untuk mendukung partisipasi anak dalam pembangunan, adanya komitmen untuk melakukan politik anggaran selepas Perda KLA disahkan supaya bisa memastikan bahwa pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal, serta dalam jangka panjang membuat portal aduan untuk memfasilitasi anak dalam menyampaikan aspirasi.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dinas PPKB dan PPPA menggunakan strategi komunikasi persuasif melalui empat bagian dalam proses *translation*, yakni (1) *Problematization*, bagian dimana aktor melakukan pemingkanaan masalah, dimana pada bagian ini juga terjadi proses *co-orientation* antara Dinas PPKB dan PPPA dan Ketua Forum Puspa yang kemudian menjadi *focal actor*, (2) *Interestment*, bagian dimana *focal actor* meyakinkan aktor lain untuk membentuk jaringan, (3) *Enrollment*, bagian dimana aktor melakukan negosiasi dan menerapkan strategi, dan (4) *Mobilization*, bagian dimana aktor memastikan bahwa proses berjalan dengan lancar. Strategi komunikasi yang dilakukan telah mampu

mengoptimalkan *human actor* dan *non-human actor* (Kebijakan dan hasil evaluasi).

2. Pihak yang terlibat dalam mendorong kebijakan Kota Layak Anak (KLA) diantaranya Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKB dan PPPA) Kabupaten Pacitan, Sekretaris Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan sekaligus menjabat sebagai Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Pacitan Tahun 2022/2023, Kepala Bidang PPPA Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sekaligus menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan Gugus Tugas KLA Pacitan, Ketua DPRD Kabupaten Pacitan Periode 2025/2029, Ketua DPRD Kabupaten Pacitan Periode 2019/2024, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pacitan sekaligus Ketua Panitia Khusus XXVIII Raperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan, Kepala Bagian

Hukum Pemda Pacitan, Ketua Forum Anak Kabupaten Pacitan Periode 2023/2024, dan Ketua Forum Puspa.

3. Penyusunan Perda KLA ini berdampak pada tumbuhnya komitmen dari berbagai pihak dalam mendukung Kota Layak Anak. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan beberapa aktor untuk mengawal pelaksanaan perlindungan anak dan munculnya beberapa inovasi. Mulai dari dibentuknya sistem Sigap untuk melakukan pendokumentasian dan pengadministrasian yang nantinya akan mendukung proses evaluasi KLA, munculnya Musrenbang Perempuan dan Anak sebagai salah satu sarana untuk mendukung partisipasi anak dalam pembangunan, adanya komitmen melakukan politik anggaran selepas Perda KLA disahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal, serta dalam jangka panjang membuat portal aduan untuk memfasilitasi anak dalam menyampaikan aspirasi.

REKOMENDASI

1. Rekomendasi Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan bagaimana strategi

komunikasi dilakukan dengan membentuk jaringan aktor untuk mendorong kebijakan Kota Layak Anak di Kabupaten Pacitan. Sehingga, diharapkan dapat menjadi bahan kajian penelitian yang akan datang. Adapun peneliti menyarankan adanya penelitian mengenai strategi komunikasi dalam menjalankan Perda KLA, mengingat masih ada beberapa pihak yang memandang sebelah mata permasalahan anak bahkan menganggap bahwa isu perlindungan anak hanya menjadi tanggungjawab dari salah satu instansi saja. Sehingga penelitian ini dapat terus berkesinambungan. Selain itu, peneliti juga berharap lebih banyak kajian menggunakan *actor network theory* dalam konteks pembentukan urgensi dan pengambilan kebijakan pemerintahan.

2. Rekomendasi Praktis

Penelitian ini akan menjadi evaluasi bagi Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan dalam melakukan strategi komunikasi untuk mendorong kebijakan Kota Layak Anak (KLA). Mulai dari bagaimana proses yang telah dilalui, kelebihan, kekurangan, dan kendala yang ditemui. Sehingga kedepannya dapat melanjutkan kelebihan yang sudah ada, serta memperbaiki kekurangan dan mencegah kendala yang serupa bisa terjadi lagi. Misalnya dengan meningkatkan pemahaman tentang konsep Kota Layak Anak (KLA) kepada internal Dinas PPKB

dan PPPA, Gugus Tugas KLA, hingga OPD. Kemudian membangun komunikasi yang berkelanjutan supaya tidak ada pihak yang merasa ditinggalkan dan Perda KLA dapat segera disahkan.

3. Rekomendasi Sosial

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses penentuan urgensi dan pembentukan kebijakan Perda Kota Layak Anak yang melibatkan berbagai pihak. Sehingga kedepannya, ketika sudah disahkan, masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan Perda Kota Layak Anak. Selain itu, pemerintah diharapkan secara konsisten menunjukkan komitmennya untuk menerapkan prinsip hak anak dalam setiap pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan terkait dengan anak, yakni non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan keberlangsungan, serta penghargaan terbaik pada pandangan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A. (2011). *Komunikasi Politik: Filsafat-Paradigma-Teori-TujuanStrategi dan Komunikasi Politik Indonesia*. Graha Ilmu.
- Callon, M. (1986). *Some Elements of a Sociology of Translation: Domestication of the Scallops and The Fishermen of St Brieuc Bay*. Routledge.
- Cordero-Vinueza, V. A., Niekerk, F. (Femke), & van Dijk, T. (Terry). (2023). Making child-friendly cities: A socio-spatial literature

- review. *Cities*, 137, 104248.
<https://doi.org/10.1016/j.cities.2023.104248>
- Cugelman, B., Thelwall, M., & Dawes, P. (2009). Communication-based influence components model. *ACM International Conference Proceeding Series*, 350. <https://doi.org/10.1145/1541948.1541972>
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2011). *Theories of Human Communication Tenth Edition*. Waveland Press, Inc.
- Pemerintah Indonesia. (2011). *Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Sekretariat Negara. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>
- Pribadi, T., & Muhyidin, A. (2014). *Sistem Politik Indonesia*. Universitas Terbuka.
- Sunarto. (2024). Paradigma. In T. Rahardjo, Sunarto, T. Lukmantoro, N. S. Ulfa, L. R. Rahmiaji, & Y. T. Budiarsa (Eds.), *Memahami Metode Penelitian Komunikasi*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Warren, c., Becken, S., & Coghlan, A. (2016). Using Persuasive Communication to Co-create Behavioural Change – Engaging with Guests to Save Resources at Tourist Accommodation Facilities. *Journal of Sustainable Tourism*, 1–20.
<http://www.tandfonline.com/action/showCitFormats?doi=10.1080/09669582.2016.1247849>